

ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN PENDUDUK

DI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2010 - 2015

Rizki Bayhaqi

Fakultas Ekonomi Univeritas Islam Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat, menganalisis dan mengetahui ketimpangan pendapatan wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan variabel bebas IPM, PDRBADHK, Jumlah Penduduk dan DAU. Data yang digunakan adalah data cross section dan data time series yang biasanya disebut dengan data panel pada tahun 2010-2015 dengan metode Fixed Effects Model (FEM) pada program eviews 8.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan Indeks Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Barat masih tergolong rendah walaupun mengalami kenaikan, variabel IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini terjadi karena nilai IPMnya masih rendah karena tingkat kesejahteraan penduduknya masih rendah, sehingga perlu mendapat prioritas penanganan yang lebih banyak untuk dapat disejajarkan dengan kabupaten/kota lainnya, karena sebagaimana dimaklumi bahwa IPM mencakup unsur analisis yang meliputi variabel ekonomi dan non ekonomi. Variabel non ekonom diukur dari tingkat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat sedangkan variabel ekonomi dilihat dari pendapatan yang menunjukkan daya belimasyarakat. Variabel PDRBADHK dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dan variabel DAU berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Kata Kunci: *Gini Ratio, IPM, PDRB Atas Dasar Harga Konstant, Dana Alokasi Umum*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan, yang dimana terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. Di setiap 5 pulau besar tersebut pasti membutuhkan sebuah pembangunan ekonomi. Pada hakekatnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam pembangunan Indonesia pasti memiliki berbagai masalah yang dihadapi. Salah satunya adalah ketimpangan pendapatan antar wilayah. Ketimpangan terjadi karena salah satu faktor seperti pemerintah lebih membangun daerah perkotaan dan di daerah hanya beberapa yang tersentuh oleh pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta menghilangkan ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan karena di wilayah Kalimantan Barat yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 2 Kota memiliki latar belakang perbedaan antar wilayah, baik dari karakteristik alam, sosial, ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusianya.

Pembangunan ekonomi daerah di Kalimantan Barat diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan. Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membantu

suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999).

Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi di dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk yang semakin bertambah, oleh sebab itu dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Hal ini dapat terpenuhi lewat peningkatan output secara agregat baik barang maupun jasa setiap tahunnya (Tambunan, 2001).

Pembangunan ekonomi masyarakat hakekatnya merupakan usaha yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Menurut Meier (*Gemmell, 1994; 196*) pembangunan ekonomi adalah proses yang dapat menciptakan pendapatan *riil* perkapita sebuah Negara meningkat untuk periode jangka panjang dengan syarat, sejumlah orang hidup dibawah garis kemiskinan mutlak tidak naik, dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.

Permasalahan ketimpangan yang ada saat ini tentunya akan dapat menggagalkan pembangunan ekonomi dari setiap daerah, dimana ketimpangan juga merupakan faktor terpenting yang di perhatikan dalam

pembangunan ekonomi. Adanya ketimpangan pendapatan seperti yang terjadi di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat tentunya dapat membedakan perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat.

Dalam pembangunan pasti mempunyai pro dan kontra dari masyarakat. Ketidakpuasan dan kritik yang timbul dalam proses pembangunan pada dasarnya bukanlah semata-mata adanya pertumbuhan yang telah dicapai, akan tetapi karena perkembangan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut kurang mampu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, bahkan ketimpangan pendapatan semakin besar dan telah menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya pengangguran, kurangnya sarana kesehatan dan pendidikan, perumahan, kebutuhan pokok, dan lain-lain.

**Gini ratio (%) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat
Tahun 2010-2015**

Kabupaten/ Kota	Gini Ratio					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kalimantan Barat	0.37	0.36	0.36	0.37	0.37	0.31
Sambas	0.31	0.36	0.35	0.35	0.35	0.30
Bengkayang	0.30	0.33	0.34	0.31	0.32	0.27
Landak	0.20	0.26	0.34	0.31	0.30	0.31
Mempawah	0.40	0.31	0.33	0.32	0.31	0.29
Sanggau	0.34	0.34	0.39	0.32	0.31	0.29
Ketapang	0.41	0.31	0.30	0.32	0.31	0.33
Sintang	0.24	0.30	0.35	0.30	0.32	0.28
Kapuas Hulu	0.24	0.35	0.31	0.30	0.31	0.33
Sekadau	0.23	0.28	0.33	0.28	0.31	0.33
Melawi	0.28	0.27	0.33	0.31	0.28	0.28
Kayong Utara	0.28	0.34	0.38	0.38	0.29	0.35
Kubu Raya	0.29	0.34	0.35	0.38	0.42	0.32
Kota Pontianak	0.35	0.35	0.34	0.38	0.33	0.31
Kota Singkawang	0.32	0.31	0.36	0.37	0.38	0.33

Sumber: BPS Provinsi Kalbar

Jika dilihat dari sisi ketimpangan pendapatan yang ada pada tabel diukur menggunakan gini ratio, nilai gini ratio di Kalimantan Barat dari

tahun 2010 ke 2011 angkanya mengalami penurunan sebesar 0.01 poin pada tahun 2010 sebesar 37% menjadi 36% dan pada tahun 2011 ke 2012 tidak terjadi perubahan tetap sebesar 36% tetapi pada tahun 2013 angkanya mengalami kenaikan 0.01 poin menjadi 0.37% dan di tahun 2014 angkanya tidak mengalami kenaikan tetap pada sebesar 37% dan pada tahun 2015 angkanya turun sebesar 0.06 poin menjadi 31%. Dilihat dari ketimpangan antar Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat dari data tersebut mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2015 ketimpangan paling tinggi terdapat pada Kabupaten Kayong Utara sebesar 0.35%, sehingga besarnya mulai mengkhawatirkan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hasil pembangunan adalah dengan melihat tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Ukuran yang sering digunakan adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dianggap telah dapat mewakili tingkat kesejahteraan penduduk yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, karena sebagaimana dimaklumi bahwa IPM mencakup unsur analisis yang meliputi variabel ekonomi dan non ekonomi. Variabel non ekonomi diukur dari tingkat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat sedangkan variabel ekonomi dilihat dari pendapatan yang menunjukkan daya beli masyarakat, maka dengan asumsi ini kabupaten/kota yang nilai IPMnya masih rendah dianggap tingkat kesejahteraan

penduduknya masih rendah, sehingga perlu mendapat prioritas penanganan yang lebih banyak untuk dapat disejajarkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Peningkatan IPM di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat juga sangat sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi Kalimantan Barat yang telah menjadikan IPM sebagai salah satu alat analisis untuk menilai kemajuan maupun disparitas antar kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Barat.

Menurut Sukirno (2004), salah satu alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Perekonomian pada suatu wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ketahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat melalui PDRB dan PDRB per kapita.

Menurut BPS, PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang di hasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Sementara itu, PDRB Perkapita Atas Dasar harga Konstan (ADHK tahun 2000) menunjukkan rata-rata pendapatan per kepala penduduk secara riil. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa PDRB perkapita adalah pendekatan ukuran rata-rata pendapatan perkapita di suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh setiap Negara yang sedang berkembang dalam usaha pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebar cukup merata dan diikuti dengan membaiknya taraf hidup dibawah garis kemiskinan. Sasaran yang dicapai pada umumnya dalam pembangunan ekonomi di Negara-negara berkembang adalah untuk mencapai tingkat pertumbuhan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk (*Robinson, 2004: 18*).

Dalam masalah ketimpangan pendapatan kita juga harus melirik DAU (Dana Alokasi Umum) Provinsi tersebut karena menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DAU adalah salah satu dana perimbangan yang termasuk bagian dari sumber pendapatan daerah. DAU dialokasikan berdasarkan presentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN yang dialokasikan agar terjadi keseimbangan keuangan antar daerah untuk pembiayaan kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berlakunya Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintahan pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada

pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.

METODE ANALISIS

Penelitian ini menggunakan data yang bersifat kuantitatif dengan data panel 14 Kabupaten atau Kota Yang ada di Provinsi Kalimantan Barat pada kurun waktu dari tahun 2010-2015. Data kuantitatif adalah data dalam kumpulan angka-angka. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung atau data yang sudah diolah. Data sekunder disini menggunakan data antar tempat atau ruang (*cross section*) yang diambil dari keseluruhan Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan untuk data antar waktunya (*time series*) diambil mulai tahun 2010-2015. Data yang merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series* yang digunakan dalam penelitian ini disebut juga dengan data panel.

Data panel merupakan sekelompok data individual yang diteliti selama rentang waktu tertentu sehingga data panel memberikan informasi observasi tiap individu dalam sampel. Keuntungan menggunakan panel data yaitu dapat meningkatkan jumlah sampel populasi dan mempebesar *degree of freedom*, serta penggabungan informasi yang berkaitan dengan variabel *cross section* dan *time series*.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + U_{it}$$

Keterangan:

Y = Gini Ratio

β_0 = Koefisien intersep

β_1 = Koefisien pengaruh IPM (X1)

β_2 = Koefisien pengaruh PDRB ADHK(X2)

β_3 = Koefisien pengaruh Jumlah Penduduk (X3)

β_4 = Koefisien pengaruh DAU (X4)

i = Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

t = Waktu (tahun 2010-2015)

Ut = Variabel pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Skripsi ini meneliti mengenai analisis ketimpangan pendapatan penduduk di daerah Kalimantan Barat dengan menggunakan model data panel. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data *cross section* serta data *time series* setiap Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat periode 2010–2015. Data yang dipakai meliputi data Pendapatan Penduduk yang diukur dengan Gini Ratio, IPM, PDRB ADHK, Jumlah Penduduk, dan Dana Alokasi Umum.

Hasil Model Estimasi Data Panel

1. Uji Chow Test

Pengujian yang dilakukan menggunakan uji chow bertujuan untuk memilih model yang terbaik antara *common effect model* dengan *fixed effect model* dengan berdasarkan hipotesis sebagai berikut :

Ho : memilih menggunakan model estimasi *Common Effect*.

Ha : memilih menggunakan model estimasi *Fixed effect*.

Hasil Regresi Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: LOG_FIXED
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.678484	(13,66)	0.0866
Cross-section Chi-square	23.993581	13	0.0312

Pada tabel diatas hasil regresi dengan menggunakan *evIEWS 8* maka didapatkan nilai hasil probabilitas Chi-square = 0.0312, yang berarti probabilitas = $0.0312 < \alpha = 5\%$, sehingga model yang digunakan adalah model estimasi *fixed effect*.

2. Uji Hausman Test

Uji yang digunakan untuk memilih model yang terbaik antara *random effect model* dan *fixed effect model* dengan berdasarkan hipotesis sebagai berikut :

Ho : memilih menggunakan model estimasi *Random effect*.

Ha : memilih menggunakan model estimasi *Fixed effect*.

Hasil Regresi Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: LOG_RANDOM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.958570	4	0.0115

Pada tabel diatas hasil regresi dengan menggunakan *eviews 8* maka didapatkan nilai hasil probabilitas Chi-square = 0.0115, yang berarti probabilitas = $0.0115 < \alpha = 5\%$, sehingga model yang digunakan adalah model estimasi *fixed effect*.

3. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Hasil Regresi Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOG(Y?)
Method: Pooled Least Squares
Date: 06/25/18 Time: 14:38
Sample: 2010 2015
Included observations: 6
Cross-sections included: 14
Total pool (balanced) observations: 84

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.60884	9.741987	1.499575	0.1385
LOG(X1?)	4.425114	1.968539	2.247917	0.0279
LOG(X2?)	0.046173	0.016996	2.716595	0.0084
LOG(X3?)	-2.754418	1.245968	-2.210664	0.0305
LOG(X4?)	0.009749	0.006106	1.596681	0.1151
Fixed Effects (Cross)				
_SAMBAS—C	-1.010012			
_BENGKAYANG--C	-0.044365			
_LANDAK—C	-1.005424			
_MEMPAWAH—C	0.762276			
_SANGGAU—C	0.887578			
_KETAPANG—C	0.351847			
_SINTANG—C	-1.051210			
_KAPUAS_HULU--C	-1.619660			
_SEKADAU—C	-1.568377			

_MELAWI—C	-3.372484
_KAYONG_UTARA--C	1.630169
_KUBU_RAYA—C	1.496219
_KOTA_PONTIANAK--C	-2.303650
_KOTA_SINGKAWANG —C	6.847092

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.461742	Mean dependent var	-1.145279
Adjusted R-squared	0.323100	S.D. dependent var	0.126521
S.E. of regression	0.104094	Akaike info criterion	-1.499644
Sum squared resid	0.715141	Schwarz criterion	-0.978755
Log likelihood	80.98507	Hannan-Quinn criter.	-1.290251
F-statistic	3.330459	Durbin-Watson stat	1.799279
Prob(F-statistic)	0.000228		

$$Y = 14.60884 + 4.425114\text{Log}X_1 + 0.046173\text{Log}X_2 - 2.754418\text{Log}X_3 + 0.009749\text{Log}X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Gini Ratio

β_0 = Koefisien intersep

β_1 = Koefisien pengaruh IPM (X1)

β_2 = Koefisien pengaruh PDRB ADHK(X2)

β_3 = Koefisien pengaruh Jumlah Penduduk (X3)

β_4 = Koefisien pengaruh DAU (X4)

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikat. Dari hasil regresi pengaruh IPM, PDRB(ADHK), Jumlah Penduduk, DAU terhadap Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 – 2015 dengan estimasi *fixed effect*, diperoleh nilai R^2 sebesar 0.461742 atau sebesar 46%. Hal ini membuktikan bahwa variasi variabel IPM, PDRB (ADHK), Jumlah Penduduk, DAU dapat dijelaskan oleh variabel tersebut. Sedangkan sisanya sebesar 34% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

5. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau tidak berpengaruh. Dari hasil regresi didapatkan nilai probabilitas sebesar $0.000228 < \alpha = 5\%$, artinya signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

6. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)

Hasil Regresi Pengujian Hipotesis

Variabel	t -Statistik	Prob.	Keterangan
X1	2.247917	0.0279	Signifikan
X2	2.716595	0.0084	Signifikan
X3	-2.210664	0.0305	Signifikan
X4	1.596681	0.1151	Tidak Signifikan

Sumber: *eviews 8*

Berdasarkan uji *Fixed effect* yang telah dilakukan dapat kita simpulkan bahwa:

- a. X1 (IPM)

Dari hasil uji signifikansi didapatkan probabilitas $0.0279 < \alpha = 5\%$ berarti signifikan dan berpengaruh terhadap Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 – 2015. Artinya ketika jumlah IPM bertambah 1% maka akan meningkatkan Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 4.425114 %.

b. X2 (PDRB)

Dari hasil uji signifikansi didapatkan probabilitas $0.0084 < \alpha = 5\%$ berarti signifikan dan berpengaruh terhadap Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 – 2015. Artinya ketika jumlah PDRB (ADHK) bertambah satu juta rupiah maka akan meningkatkan Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0.046173%.

c. X3 (Jumlah Penduduk)

Dari hasil uji signifikansi didapatkan probabilitas $0.0305 < \alpha = 5\%$ berarti signifikan dan berpengaruh terhadap Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010-2015. Artinya ketika jumlah penduduk bertambah satu jiwa maka akan menambah Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Barat sebesar - 2.754418 jiwa.

d. X4 (DAU)

Dari hasil uji signifikansi didapatkan probabilitas $0.1151 > \alpha = 5\%$ berarti tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 – 2015.

7. Persamaan Estimasi dengan Intersep Pembeda *Cross Effect*

Persamaan estimasi dengan mempertimbangkan *cross effect* dapat dilakukan dengan menjumlahkan konstanta pada persamaan hasil estimasi dengan hasil estimasi koefisien *cross effect*. *Cross effect* diperoleh berdasarkan estimasi yang mengikuti jumlah individu dalam penelitian, maka sesungguhnya koefisien tersebut akan dimiliki oleh masing – masing unit atau individu. (Sriyana, 2014)

Persamaan regresi:

Sambas

$$Y_{it} = 14.60884 - 1.010012 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 13.598828$$

Bengkayang

$$Y_{it} = 14.60884 - 0.044365 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 14.564475$$

Landak

$$Y_{it} = 14.60884 - 1.005424 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 13.603416$$

Mempawah

$$Y_{it} = 14.60884 + 0.762276 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 15.371116$$

Sanggau

$$Y_{it} = 14.60884 + 0.887578 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 15.496418$$

Ketapang

$$Y_{it} = 14.60884 + 0.351847 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 14.960687$$

Sintang

$$Y_{it} = 14.60884 - 1.051210 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 13.55763$$

Kapuas Hulu

$$Y_{it} = 14.60884 - 1.619660 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 12.98918$$

Sekadau

$$Y_{it} = 14.60884 - 1.568377 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 14.564475$$

Melawi

$$Y_{it} = 14.60884 - 3.372484 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 11.236356$$

Kayong Utara

$$Y_{it} = 14.60884 + 1.630169 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 16.239009$$

Kubu Raya

$$Y_{it} = 14.60884 + 1.496219 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 16.105059$$

Kota Pontianak

$$Y_{it} = 14.60884 - 2.303650 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 12.30519$$

Kota Singkawang

$$Y_{it} = 14.60884 + 6.847092 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 21.455932$$

Dari hasil tersebut dapat terlihat besarnya pengaruh IPM, PDRB (ADHK), Jumlah Penduduk, dan DAU terhadap Ketimpangan Pendapatan yang ada di setiap Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Kabupaten Sambas tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 13.598828, Kabupaten Bengkayang tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 14.564475, Kabupaten Landak tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 13.603416, Kabupaten Mempawah tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 15.371116, Kabupaten Sanggau tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 15.496418, Kabupaten Ketapang tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 14.960687, Kabupaten Sintang tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 13.55763, Kabupaten Kapuas Hulu tingkat

ketimpangan pendapatan adalah sebesar 12.98918, Kabupaten Sekadau tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 14.564475, Kabupaten Melawi tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 11.236356, Kabupaten Melawi tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 11.236356, Kabupaten Kayong Utara tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 16.239009, Kabupaten Kubu Raya tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 16.105059, Kota Pontianak tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 12.30519, dan yang terakhir Kota Singkawang tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 21.455932.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh IPM, PDRB(ADHK), Jumlah Penduduk dan DAU terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 – 2015 dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel IPM berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya kurangnya kualitas pendidikan yang berperan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja, sehingga dengan adanya IPM yang baik dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.
2. Variabel PDRB didapatkan hasil bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut dikarenakan selama ini PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yang dalam peningkatannya berdampak pada kenaikan ketimpangan pendapatan.

3. Pada variabel Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpanagan pendapatan di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hal tersebut disebabkan dengan adanya peningkatan penduduk di Provinsi Kalimantan Barat adanya peningkatan populasi yang diimbangi dengan

4. Peningkatan aktivitas ekonomi akan menyebabkan perekonomian meningkat. Beban ekonomi tiap keluarga menjadi relatif rendah atau ringan.
5. Variabel DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat, hal tersebut dikarenakan dengan adanya peningkatan pengeluaran daerah yang berperan dalam peningkatan pembangunan ekonomi dengan membangun sarana dan infrastruktur, sehingga dengan adanya peningkatan tersebut dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.

2. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh IPM, PDRB(ADHK), Jumlah Penduduk dan DAU terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 – 2015 terdapat beberapa Implikasi yaitu :

1. IPM berpengaruh positif atau signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Tentunya hal tersebut harus di perhatikan oleh pemerintah, sehingga diharapkan disamping pemerintah terus berusaha meningkatkan IPM yang kurang baik, pemerintah pun harus memberikan perhatian khusus bagi penduduk terutama dalam hal pendidikan, karena pendidikan berperan dalam peningkatan kualitas produktivitas.
2. Variabel PDRB yang berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan tentunya akan menimbulkan dampak yang negatif bagi setiap daerah yang ada karena seiring dengan peningkatan PDRB akan diikuti dengan kenaikan

ketimpangan pendapatan. Hal tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah mengingat kesenjangan pendapatan merupakan permasalahan yang serius yang dihadapi oleh setiap daerah. Pembangunan yang ada bukan hanya pembangunan daerah yang bersifat terpusat namun juga yang dapat menjangkau daerah – daerah terpencil yang ada di Provinsi Kalimantan Barat sehingga roda perekonomian dapat bergerak seimbang di setiap Kabupaten/Kotanya.

3. Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dimana adanya peningkatan jumlah penduduk yang diimbangi dengan aktivitas ekonomi. Pemerintah harus mempunyai regulasi yang mengatur jumlah penduduk yang ada di Provinsi Kalimantan Barat untuk dapat meningkatkan kualitas penduduk. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan yang ada seiring untuk menciptakan penduduk yang berkualitas terutama lapangan pekerjaan padat karya. Dimana hal tersebut dapat melatih kemampuan dan keahlian bagi penduduk non-produktif. Sehingga para penduduk non-produktif dapat memiliki pendapatan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasakan kesejahteraan.
4. Variabel DAU tidak berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat. Harusnya pemerintah memberikan regulasi yang kuat untuk DAU agar tidak terjadi penyelewengan DAU karena dana tersebut sangat rawan. Selain itu pemerintah juga harus mempertajam alokasi belanja untuk mendukung pembangunan infrastruktur, penciptaan kesempatan kerja,

dan pengentasan kemiskinan, dan juga penghematan terhadap kegiatan yang kurang produktif seperti biaya perjalanan dinas, kegiatan rapat kerja, serta penerapan sistem *reward* dan *punishment* dalam pengalokasian anggaran yang bertujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan rakyat serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Riska. (2015), "*Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (2005-2013)*".[Skripsi]. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bowman, Mary Jean. 1974. "A Graphical of Personal Income Distribution The United States. American Economic Review"
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE.Yogyakarta.
- BPS.Kalimantan Barat. 2010 - 2015.
- Hadi Sasana, 2006, Analisis Dampak Transfer Pemerintah Terhadap Kinerja Fiskal di Kab/Kota di Provinsai Jateng Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 7, No. 2, Hal. 223-242.
- Kakwani and N. Podder. "On The Estimation of Lorenz Curves From Grouped Observations". International Economic Review.14 hal.278-291.
- Lincoln Arsyad, 1997, *EkonomiPembangunan*, Edisi Ketiga Penerbit BP STIE YKPN,Yogyakarta.
- Muhaimin, Ilham Farih, (2014). "Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi Di Pulau Jawa". *Skripsi* (tidak dipublikasikan), Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

- Natalia, N. 2015. *Pengaruh Jumlah Dan Jenis Kendaraan Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Kalimantan Barat*. Artikel Ilmiah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Tanjungpura.
- Ni Luh Putu dan I ketut Sudibia. "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali (2007-2013)". *Piramida*, Vol X1, No.1, : 20 – 28.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sari Rusmita, 2016, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat*. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*. Universitas Tanjungpura.
- Sriyana, Jaka (2014), *Metode Regresi Data Panel*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Susanto, A. B., & Rachmawati, L. (2013). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamongan*. *Jurnal Mahasiswa*.
- Tambunan, 2001, *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Todaro, M. dan Smith, S., (2006), "Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan", Terjemahan, Penerbit Erlangga, Ciracas Jakarta.
- Wijayanto, A. T. (2016). Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000-2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16

